

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah Negara hukum, dimana setiap orang dapat di pandang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Beberapa penerapan peraturan dalam hukum adalah merupakan sebuah usaha untuk menegakkan hukum tersebut, dimana keamanan dan ketertiban setiap lapisan masyarakat yang menjadi dasar sebuah peraturan tersebut di bentuk. Oleh karena itu, hukum bekerja dan memberikan ikatan kepada setiap lapisan masyarakat dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku karena hukum tersebut memuat norma – norma hukum.

Di dalam sebuah peraturan pasti kita akan mengenal sebuah hukum, khususnya pada hukum perdata. Hukum perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perorangan yang satu terhadap yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan dalam pergaulan masyarakat. Dengan hal ini hukum perdata seyogyanya adalah suatu hukum privat, yang dimana terlaksananya sebuah hukum tergantung pada kehendak seorang individu, karena hukum perdata langsung merujuk dan mendasar pada kepentingan individu tersebut.

Karena Indonesia bekas jajahan Negara Belanda, jadi sistem hukum eropa kontinental diterapkan di Indonesia. Sistem hukum ini kemudian dimodifikasi

agar sesuai dengan keadaan Negara Indonesia khususnya pada masa sekarang. Sebagai suatu sistem hukum, hukum Indonesia terdiri atas sub-sub hukum yang beraneka, antara lain Hukum Tata Negara, Hukum Perdata, Hukum Pidana, serta Hukum Internasional¹. Salah satu sub-sub hukum yang masih diberlakukan sampai sekarang adalah HukumPerdata.

Pelaksanaannya diserahkan masing-masing pihak. Ketentuan hokum perdata mengatur tentang perikatan, benda, waris, keluarga. Mengenai perikatan, hal tersebut dapat terjadi karena adanya suatu perjanjian. Perjanjian disini dapat menyangkut apa saja. Misalkan perjanjian pinjam meminjam. Kaitannya dengan hal ini mengenai hutang piutang.

Masalah hutang piutang merupakan persoalan manusia dengan manusia yang biasa dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Gatot supramono menjelaskan bahwa pihak yang berpiutang atau member pinjaman disebut kreditur, sedangkan pihak yang berhutang atau menerima pinjaman disebut debitur.²Perjanjian hutang piutang di masyarakat sering diadakan dengan suatu kesepakatan antara dua belah pihak untuk berjanji akan mentaati segala aturan yang ditetapkan dalam perjanjian yang telah dibuat. Bilamana kedua belah pihak sudah ada kata sepakat, dan disaksikan oleh sejumlah saksi, maka dianggap perjanjian sudah lahir seketika itu.³

¹Subekti, *HukumPerjanjian*, PT BinaAksara, Jakarta, 1999, hlm. 23.

²GatotSupramono, *PerjanjianHutangPihutang*, Prenada Media, Jakarta, 2013, hlm. 10-11.

³<http://fh.unpad.ac.id/repo/?p=3116>. DiaksesSelasa, 10 Oktober 2017 pukul 14.30.Wib

Pengertian hutang piutang sama dengan perjanjian pinjam yang dijumpai dalam kitab Undang-Undang hukum perdata pasal 1754 yang menjelaskan:

Bahwa pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah barang tertentu dan habis pemakaian dengan syarat bahwa belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.

Jadi hutang piutang merupakan kegiatan antara orang yang berhutang dengan orang lain/pihak lain pemberi hutang, dimana kewajiban untuk melakukan suatu prestasi yang dipaksakan melalui suatu perjanjian atau melalui pengadilan. Atau dengan kata lain: merupakan hubungan yang menyangkut hukum atas dasar seseorang mengharapkan prestasi dari seorang yang lain jika perlu dengan perantara hukum.

Dalam perjanjian hutang piutang masyarakat juga sering menggunakan jaminan harta benda. Para pihak yang mengadakan perjanjian yang telah dibuat sesuai dengan asas pacta sunt servanda dan segala hal yang telah disepakati tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dalam perjanjian. Akan tetapi perjanjian yang dibuat dalam bentuk lisan mengandung banyak resiko jika dibandingkan perjanjian yang dibuat dalam bentuk tertulis. Dalam perjanjian lisan, kreditur biasanya akan mengalami hambatan dalam hal pembuktian apabila debitur tidak memenuhi kewajiban. Biasanya perjanjian ini dilakukan dengan rekan profesi yang sudah dikenal dekat tanpa harus dituliskan dalam lembaran

kertas. Karena perjanjian ini didasarkan atas rasa kepercayaan orang satu dengan orang yang lain.

Perjanjian hutang piutang dengan jaminan kepercayaan hanya digunakan para pihak untuk saling membantu para pihak yang membutuhkan uang dan enggan untuk mengikat perjanjian secara resmi seperti halnya pada bank atau koperasi. Mengingat perjanjian pada bank atau koperasi terlalu rumit proses dan pelaksanaannya. Hal tersebut berdasarkan teori Steward Maculay yang menegaskan bahwa dalam suatu kontrak tidak dibutuhkan adanya bukti tertulis melainkan adanya kata sepakat saling berjabat tangan dan *real and deal* sudah dapat dikatakan kontrak.⁴ Hukum pun juga dapat memecahkan masalah hanya dengan kesepakatan dan kepercayaan para pihak yang membuat kontrak. Sebagian kalangan masyarakat di Surakarta banyak menggunakan perjanjian hutang piutang dengan jaminan kepercayaan karena merupakan kebiasaan wiraswasta. Perjanjian ini hanya dilaksanakan hanya dengan kepercayaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa ada jaminan apapun dari debitur dan tidak ada bukti tertulis untuk mengikat kepercayaan para pihak. Perjanjian ini kreditur seperti menjemput bola, yaitu kreditur mendatangi debitur agar debitur berhutang kepada kreditur dengan atau tanpa jaminan.

Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme para pihak memiliki kebebasan dalam membuat perjanjian, sebuah perjanjian dapat dibuat secara lisan atau secara tertulis. Perjanjian yang dibuat secara lisan tetap

⁴ Suharmoko, 2004 *Hukum Perjanjian* : Teori dan analisa kasus, Kencana:Jakarta, hal 3

sah dan mengikat kedua belah pihak, karena harus dilandasi dengan kata sepakat dan harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Perjanjian hutang piutang walaupun dapat dibuat secara lisan, sebaiknya dilakukan dengan cara tertulis, karena akan lebih mudah membuktikan adanya peristiwa hutang piutang. Namun jika perjanjian hutang piutang itu dilakukan secara lisan dengan jaminan kepercayaan, kemudian ada salah satu pihak mengingkari perjanjian sehingga terjadi wanprestasi yang disebabkan karena kesalahannya tidak mampu membayar utangnya, yang berakibat merugikan pihak yang lain yang mengakibatkan pihak yang dirugikan itu mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Oleh karena itu bagaimana proses penyelesaian perkara melalui Pengadilan Negeri. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas penulis tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul “PROSES PENYELESAIAN PERKARA HUTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN KEPERCAYAAN”. (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penulisan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian atas perkara hutang piutang dengan jaminan kepercayaan ?
2. Bagaimana hakim dalam menentukan putusan atas perkara hutang piutang dengan jaminan yang telah terbukti ?

3. Bagaimana akibat hukumnya setelah perkara hutang piutang mempunyai kekuatan hukum tetap ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam pembuktian atas perkara hutang piutang dengan jaminan kepercayaan.
2. Untuk mengetahui putusan hakim atas perkara hutang piutang dengan jaminan yang telah terbukti.
3. Untuk mengetahui akibat hukum dari perkara hutang piutang yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

D. Manfaat Penelitian

Pada penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut yaitu:

1. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan serta membentuk pola pikir kemampuan penulis dalam menerangkan ilmu hukum dalam hukum perdata, khususnya dalam proses penyelesaian perkara hutang piutang

2. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan informasi secara tertulis maupun sebagai referensi untuk menambah ilmu pengetahuan pembaca atau masyarakat serta dapat membantu memecahkan masalah yang mungkin sedang dihadapi oleh pembaca atau masyarakat menyangkut penyelesaian perkara perdata, apabila terjadi perkara hutang piutang dengan jaminan kepercayaan.

3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan yang berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya mengenai proses penyelesaian perkara hutang piutang dengan jaminan kepercayaan.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya.⁵ Adapun pengumpulan data yang diperlukan atau dipakai sebagai materi penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif karena dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah kaidah-kaidah

⁵ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta

hukum, asas-asas hukum tentang proses penyelesaian perkara hutang piutang dengan jaminan kepercayaan di Pengadilan Negeri

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara jelas mengenai proses penyelesaian perkara hutang piutang dengan jaminan kepercayaan di Pengadilan Negeri.

3. Sumber Data

a. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh penulis dari sumber-sumber tertulis seperti :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-Bahan Hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- b) HIR dan RBG
- c) Yurisprudensi

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmu hukum, jurnal.

Dan dokumen-dokumen berhubungan dengan hutang piutang

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Hukum

b. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Surakarta dari objek penelitian dan observasi lapangan.

1) Lokasi Penelitian

Dalam hal ini penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta.

2) Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menetapkan subyek yang diteliti yaitu dengan menggali informasi dari Hakim yang pernah memeriksa dan memutus perkara proses penyelesaian perkara hutang piutang dengan jaminan kepercayaan.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu metode pengumpulan data dengan cara mencari, mempelajari, dan menghimpun ketiga bahan hukum tersebut diatas yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap obyek yang akan diteliti sebagai berikut:

1) Observasi

Observasi yaitu metode pengumpulan data dengan pengecekan data-data perkara yang ada hubungannya dengan penulisan yang ada di Pengadilan Negeri Surakarta

2) Daftar pertanyaan

Daftar pertanyaan merupakan rangkaian pertanyaan tentang suatu hal, dalam penelitian ini khususnya pertanyaan mengenai proses serta pembuktian atas perkara perjanjian hutang piutang yang dilakukan dengan jaminan kepercayaan. Daftar pertanyaan ini disusun guna mempermudah penulis dalam melakukan penelitian

3) Wawancara

Wawancara dilakukan dengan bertanya secara langsung kepada informan dalam suatu permasalahan. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam proses penyelesaian perkara tanah bangunan tersebut di Pengadilan Negeri Surakarta

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif kualitatif yaitu dengan cara menyusun data-data yang telah dikumpulkan meliputi peraturan, buku-buku, yurisprudensi mengenai proses penyelesaian perkara hutang piutang dengan jaminan kepercayaan, yang dipadukan pendapat responden lapangan setelah dipadukan dicari pemecahannya dianalisa secara kualitatif kemudian ditarik kesimpulan.

F. Sistematika Penulis

Dalam sistem penulisan hasil penelitian ini, penulis menyusun beberapa bab yang mana masing-masing bab memiliki keterkaitan satu sama lain. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan tentang perkara hutang piutang dengan jaminan kepercayaan
 - 1. Pengertian perkara hutang piutang.

2. Pengertian jaminan kepercayaan.
3. Pihak-pihak dalam hutang piutang.
4. Perjanjian antara para pihak dalam perkara hutang piutang berdasarkan kepercayaan.
5. Hak dan kewajiban para pihak dalam perkara hutang piutang dengan jaminan kepercayaan.
6. Tanggung jawab hukum atas dasar wanprestasi.

B. Tinjauan tentang proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri

1. Menyusun gugatan
2. Mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri
3. Pemanggilan para pihak
4. Proses pemeriksaan perkara meliputi
 - a. Usaha perdamaian
 - b. Pembacaan gugatan penggugat
 - c. Jawaban tergugat
 - d. Replik
 - e. Duplik
 - f. Pembuktian meliputi
 - 1) Pengertian pembuktian
 - 2) Bahan pembuktian
 - 3) Alat bukti
 - 4) Penilaian pembuktian

5) Kesimpulan pembuktian

g. Putusan meliputi

1) Pengertian putusan

2) Macam – macam putusan

3) Pertimbangan putusan hakim

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan hakim dalam pembuktian atas perkara hutang piutang dengan jaminan kepercayaan.

B. Keputusan hakim atas perkara hutang piutang atas jaminan yang telah terbukti.

C. Akibat hukumnya setelah perkara hutang piutang mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran